

**ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL  
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI  
JAWA TIMUR**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Ferani Ingrid Tiara  
125020101111025**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2016**

**LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL**

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI  
KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR**

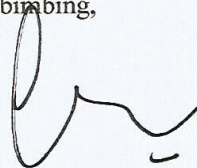
Yang disusun oleh :

Nama : Ferani Inggrid Tiara  
NIM : 1250201111025  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di  
depan Dewan Penguji pada tanggal 24 Februari 2016

Malang 24 Februari 2016

Dosen Pembimbing,



**Prof. Candra Fajri Ananda, SE., M.Sc., Ph.D.**

NIP. 19641029 198903 1 001

# ANALISIS PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR

Ferani Ingrid Tiara, Candra Fajri Ananda  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya  
Email: feraniingrid@yahoo.co.id

## ABSTRAK

*Kinerja keuangan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan dari adanya desentralisasi. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diprosikan oleh rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, derajat desentralisasi fiskal, dan rasio ketergantungan. Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah akumulasi modal yang dikeluarkan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Metode yang digunakan adalah path analysis dengan bantuan program Analysis of Moment Structure (AMOS) dengan menggunakan data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah berpengaruh terhadap belanja modal, belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan secara tidak langsung kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal.*

*Kata kunci: Kinerja Keuangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi.*

---

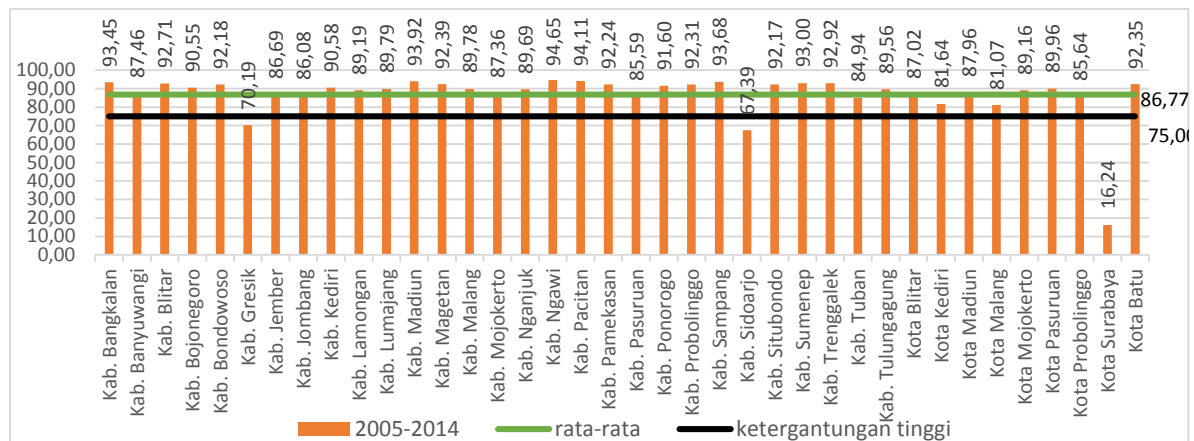
## A. PENDAHULUAN

Dari Sejak tahun 2001 pemerintah memutuskan untuk meyerahkan kekuasaan ke daerah untuk mengelola sumber daya daerahnya sendiri dalam bentuk desentralisasi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (perubahan dari UU Nomor 32 Tahun 2004) menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Perubahan mendasar pada sistem pemerintahan ini memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk lebih meningkatkan potensi daerahnya yaitu sumber kekayaan yang dimiliki daerah. Otonomi Daerah merupakan salah satu proses untuk melaksanakan pembangunan ke arah yang lebih baik yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Secara luas desentralisasi ialah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat seperti hubungan luar negeri, pengadilan, moneter dan keuangan serta pertahanan keamanan (Adisubrata, 1999).

Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban ini terpenuhi apabila pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerahnya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangannya secara optimal (Halim, 2002). Untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Daerah harus mampu mengelola sumber dayanya terutama sumber daya keuangan secara optimal yang dapat di lihat salah satunya dengan mengukur kinerja keuangan daerah itu sendiri.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari ukuran analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dan kondisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Namun, hingga saat ini masih banyak daerah yang masih memiliki ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat sehingga belum mampu mandiri dari segi keuangan. Dari data pada grafik 1 dapat dilihat dalam sepuluh tahun terakhir rata-rata ketergantungan fiskal pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur sebesar 86,77%. Daerah dengan rata-rata ketergantungan fiskal tertinggi yaitu Kabupaten Ngawi dengan ketergantungan fiskal 94,65%. Rata-rata ketergantungan fiskal yang terendah yaitu Kota Surabaya yaitu sebesar 16,24%. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah daerah di Jawa Timur masih memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Hanya satu kota yaitu Surabaya yang memiliki ketergantungan fiskal rendah atau bisa dikatakan telah memiliki kemandirian dalam hal keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari desentralisasi yaitu agar daerah dapat mandiri sesungguhnya belum tercapai dikarenakan masih banyak daerah yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat. Jika suatu daerah masih belum mandiri dalam arti memiliki ketergantungan fiskal kepada pemerintah pusat diharapkan mampu mengelola keuangannya secara efektif dan efisien agar menambah jumlah pendapatan daerah salah satunya dengan mengalokasikan dana untuk belanja modal. Berikut adalah Ketergantungan Fiskal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2014 :

Grafik 1. Ketergantungan Fiskal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2014



Sumber: DJPK, 2015 (Diolah)

Sistem desentralisasi dapat meningkatkan akumulasi modal pemerintah daerah karena pemerintah daerah dalam pelaksanaan sistem desentralisasi memiliki kewenangan yang lebih luas untuk menggali maupun mengelola potensi-potensi yang dimilikinya. Penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah sesuai dengan teori tradisional dalam teori *fiscal federalism* bahwa adanya keuntungan alokatif yang akan diterima oleh pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi. Belanja modal merupakan komponen yang penting dalam meningkatkan kualitas dan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Belanja modal sebagai salah satu cara melakukan pembangunan daerah. Pembangunan yang dilakukan umumnya menginginkan tercapainya kemandirian wilayah secara ekonomi. Kemandirian dalam arti sempit yaitu kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunannya sendiri (Sudantoko, 2003). Dengan belanja modal pemerintah daerah tidak hanya akan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat namun juga melakukan investasi yang nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga tujuan desentralisasi yaitu kemandirian daerah dapat tercapai. Hal ini nantinya juga akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi merupakan suatu bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang dan sumber daya dana, personil dan lain-lain) dari pemerintah pusat ke level pemerintah daerah (Khusaini, 2006). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 7 Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang di bidang fiskal (penerimaan dan pengeluaran) dari level pemerintah yang lebih tinggi ke level pemerintah yang lebih rendah.

Dalam perspektif teori, desentralisasi akan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat (*their constituents*), sehingga dalam sistem pemerintahan yang desentralistik akan menciptakan efisiensi dalam perekonomian. berbagai kajian literatur berusaha menjelaskan bagaimana dampak dari desentralisasi terhadap perekonomian dan *public service delivery*, sehingga dapat mengantarkan masyarakat lebih sejahtera (Khusaini, 2006). Dalam berbagai kajian tentang *fiscal federalism*, terdapat dua perspektif teori yang menjelaskan tentang dampak ekonomi dari adanya desentralisasi yaitu :

#### a. Traditional Theories (First Generation Theories)

Teori tradisional tentang *fiscal federalism* lebih banyak menekankan pada keuntungan alokatif dari desentralisasi. Keuntungan alokatif yang dimaksud dapat berupa kemudahan dalam menerima informasi-informasi yang terdapat di masyarakat. Keuntungan alokatif berdasarkan pada teori tradisional didasari oleh dua ide. Pertama yaitu "*knowledge in society*" menurut Hayek (1945) merupakan proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan lebih mudah dengan penggunaan informasi yang efisien karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat. Ide yang kedua, Tiebout (1956) mengenalkan persaingan dalam pemerintah daerah dan ia memiliki pandangan bahwa kompetisi antar pemerintah daerah tentang alokasi pengeluaran publik memungkinkan masyarakat memilih berbagai barang dan jasa publik yang sesuai dengan selera dan keinginan mereka.

#### b. New Perspective Theories (Second Generation Theories)

Dalam *Second Generation Theories*, menjelaskan bahwa desentralisasi akan mempengaruhi perilaku pemerintah daerah. Implikasi penting dari teori ini adalah bahwa desentralisasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, di mana hal tersebut sangat bergantung pada fiskal intensif yang diberikan kepada masyarakat. Teori ini menjelaskan bagaimana

desentralisasi akan berpengaruh terhadap perilaku pemerintah daerah. Desentralisasi memberikan ruang gerak yang lebih bagi pemerintah daerah untuk berimprovisasi dalam pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah serta kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan daerah seperti pelaksanaan tugas-tugas rutin, pelayanan publik dan peningkatan investasi yang produktif.

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Sularso dan Restianto, 2011). Secara sederhana, kinerja keuangan organisasi atau individu dapat dikatakan baik jika hasil yang dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Apabila hasil yang dicapai melebihi rencana dapat dikatakan kinerja keuangan suatu organisasi sangat baik dan jika hasil yang di capai tidak sesuai rencana (kurang) maka organisasi atau individu tersebut memiliki kinerja keuangan yang masih kurang. Pada daerah kinerja keuangan diukur dari berbagai analisis rasio keuangan. Analisis keuangan pada APBD dilakukan untuk membandingkan hasil yang dicapai pada suatu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

### **Rasio Pengukuran Kinerja Keuangan**

Terdapat beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD untuk mengukur kinerja keuangan suatu daerah antara lain sebagai berikut :

#### **a. Rasio Kemandirian**

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan oleh daerah. Secara sederhana rasio kemandirian keuangan daerah dapat diformulasikan sebagai :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah}^{\text{Pusat}} \text{ dan pinjaman}^{\text{Provinsi}}} \times 100\%$$

#### **b. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah**

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif jika rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Adapun formulasinya adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}} \times 100\%$$

#### **c. Derajat Desentralisasi Fiskal**

Derajat desentralisasi menunjukkan kontribusi PAD terhadap Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Kuncoro, 2004). Derajat Desentralisasi dapat dihitung dengan formulasi:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

#### **d. Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya. Semakin besar nilai rasio ini maka semakin besar pula tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat (DJPK, 2014). Rasio ketergantungan dapat dihitung dengan formulasi

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

### **Belanja Modal**

Menurut standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan berakibat menambahnya belanja yang sifatnya rutin. Belanja modal diklasifikasikan menjadi dua kelompok, kelompok pertama adalah belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Kelompok kedua adalah belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak dapat dinikmati langsung oleh masyarakat (Sularso dan Restianto, 2011).

### **Pertumbuhan Ekonomi Daerah**

Dalam Sukirno (2002) pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PDRB tanpa memandang

apakah kanaan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau perubahan dalam struktur ekonomi berlaku atau tidak. Pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Komponen utama pertumbuhan ekonomi dalam suatu masyarakat menurut Todaro (2000) yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi.

### Kerangka Pemikiran

Berlakunya desentralisasi fiskal membuat pemerintah daerah memiliki wewenang yang luas terhadap pengelolaan keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat ditunjukkan dengan kondisi kinerja keuangan daerah yang baik pula. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik dapat meningkatkan belanja modal pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat. Besarnya belanja modal yang dikeluarkan untuk pembangunan nantinya akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan begitu maka kinerja keuangan pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, maka kerangka pemikiran yang dikembangkan dalam sebuah model adalah sebagai berikut :



Sumber : Ilustrasi Penulis, 2015

### Hipotesis

- H<sub>1</sub> : Kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, derajat desentralisasi fiskal, dan rasio ketergantungan secara langsung berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.  
 H<sub>2</sub> : Belanja modal secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi  
 H<sub>3</sub> : Kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, derajat desentralisasi fiskal, dan rasio ketergantungan secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

## C. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian menggunakan kuantitatif dengan jenis data sekunder sebanyak 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur pada tahun 2005-2014. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi berdasarkan data yang bersumber dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Jenis data yang digunakan adalah data panel dengan menggunakan metode *path analysis*.

Untuk menghindari persamaan pengertian dan memberikan batasan yang tegas dari variabel yang diteliti, maka berikut adalah definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

#### 1. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat+Prov+Painjaman}} \times 100\%$$

Kemandirian keuangan adalah kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah menunjukkan semakin tinggi kemampuan daerah dalam membiayai pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

#### 2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}} \times 100\%$$

Efektifitas PAD adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang diperoleh dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebelumnya secara riil berdasarkan potensi daerah.

#### 3. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi dihitung dengan rumus:

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Derajat desentralisasi menunjukkan kontribusi PAD terhadap Total Penerimaan Daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

#### 4. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dihitung dengan rumus:

$$\text{Tingkat Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Tingkat ketergantungan menunjukkan kontribusi pendapatan dari transfer terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ketergantungan maka semakin besar ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat/provinsi.

5. Belanja Modal

Belanja modal dapat dihitung dengan rumus:

$$Belanja\ Modal = \frac{Belanja\ Modal}{Total\ Belanja} \times 100\%$$

Alokasi belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode anggaran dibandingkan dengan total belanja dalam APBD.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan rumus :

$$G = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

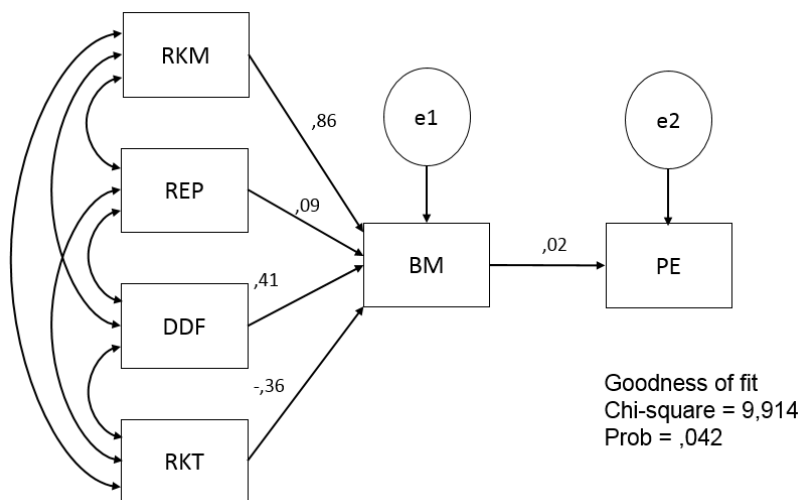
Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan kenaikan PDRB tanpa melihat apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

Untuk mengetahui pola hubungan dari seluruh variabel, diuji tiga hipotesis. Dari hasil pengolahan data dengan *path analysis* sebagaimana pada gambar 1 dapat diketahui besarnya koefisien masing-masing variabel terhadap variabel lainnya. Untuk menilai signifikansi model analisis jalur antar variabel dapat dilihat dari nilai C.R atau t-hitung > t-tabel = 1,282 atau dengan melihat p-value yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10%. Hasil *path analysis* dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1. Hasil *Path Analysis* Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Timur



Sumber : Olah Data AMOS, 2016

Hasil pengujian hipotesis penelitian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 Hasil Pengujian Hipotesis

Variable	C.R	Koefisien	P-value	Keterangan
RKM terhadap BM	1,497	0,861	0,009	Signifikan
REP terhadap BM	4,576	0,092	0,000	Signifikan
DDF terhadap BM	2,888	0,413	0,074	Signifikan
RKT terhadap BM	-0,213	-0,365	0,831	Tidak Signifikan
BM terhadap PE	2,871	0,019	0,004	Signifikan

Sumber : Olah Data AMOS, 2016

Berdasarkan hasil di atas, menunjukkan bahwa rasio kemandirian terhadap belanja modal memiliki koefisien 0,861 dan C.R sebesar 1,497 dengan  $p\text{-value} < 0,1$ , maka secara statistik variabel rasio kemandirian berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Kemudian jalur antara rasio efektivitas PAD terhadap belanja modal memiliki koefisien 0,092 dan C.R 4,576 dengan  $p\text{-value} < 0,1$ , maka secara statistik variabel rasio efektivitas PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Selanjutnya jalur antara variabel derajat desentralisasi fiskal dengan belanja modal memiliki koefisien 0,413 dan C.R 2,888 dengan  $p\text{-value} < 0,1$  maka secara statistik derajat desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal. Untuk rasio ketergantungan terhadap belanja modal memiliki koefisien -0,365 dan C.R -0,213 dengan  $p\text{-value} > 0,1$ , maka secara statistik variabel rasio ketergantungan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Oleh karena itu hasil penelitian ini mendukung hipotesis bahwa kinerja keuangan secara langsung berpengaruh terhadap belanja modal.

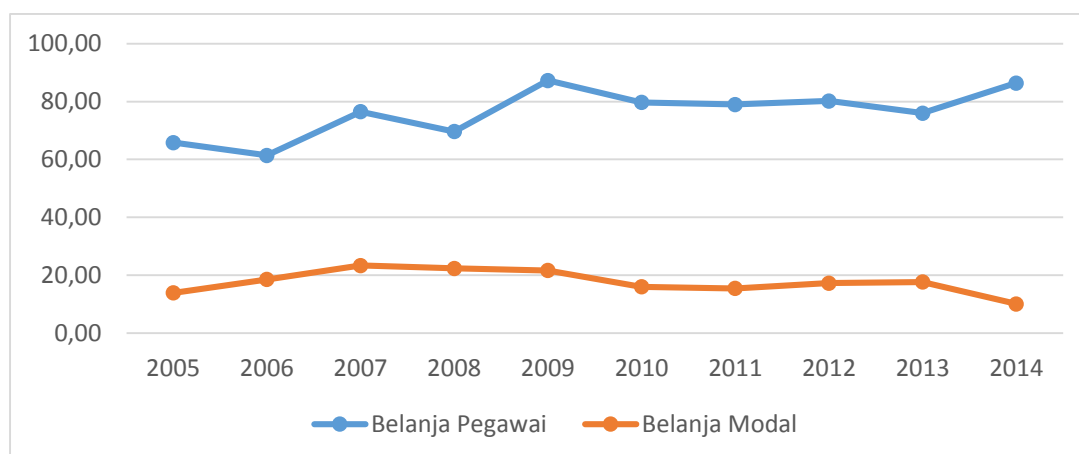
Hipotesis kedua yang diajukan adalah belanja modal secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menyatakan bahwa belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien 0,019 dan C.R 2,871 dengan  $p\text{-value} < 0,1$ , maka secara statistik variabel belanja modal secara langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan.

Hipotesis ketiga adalah kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, derajat desentralisasi fiskal, dan rasio ketergantungan secara tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Berdasarkan pada tabel 1 maka pengaruh tidak langsung rasio kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar  $0,861 \times 0,019 = 0,016$ . Untuk pengaruh tidak langsung rasio efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar  $0,092 \times 0,019 = 0,0017$ . Kemudian pengaruh tidak langsung derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar  $0,413 \times 0,019 = 0,078$ . Selanjutnya pengaruh secara tidak langsung rasio ketergantungan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar  $-0,365 \times 0,019 = -0,006935$ .

## Pembahasan

Pengaruh secara langsung kinerja keuangan terhadap belanja modal diterima dalam penelitian ini. Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya belanja modal yang dikelaurkan oleh pemerintah dipengaruhi oleh kinerja keuangan pemerintah daerah terutama rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan derajat desentralisasi fiskal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sularso dan Restianto (2011) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan berupa rasio kemandirian dan rasio efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah. Namun temuan ini menunjukkan tidak ada indikasi pengaruh secara langsung rasio ketergantungan terhadap belanja modal pemerintah. Alasan mengapa rasio ketergantungan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya yakni dana transfer dibagi dengan total pendapatan. Di kabupaten/kota Jawa Timur sendiri hampir keseluruhan daerah memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi mendekati 100% yang berarti bahwa jumlah dana transfer begitu besar sejalan dengan jumlah pendapatan total. Hal ini memungkinkan adanya pengeluaran pemerintah dari dana transfer mayoritas digunakan untuk belanja pegawai sehingga tidak berpengaruh terhadap peningkatan belanja modal sesuai dengan trend belanja yang ada pada penjelasan sebelumnya. Hasil ini sejalan dengan penelitian Lucky (2013) bahwa kemampuan pembiayaan tidak berpengaruh terhadap belanja modal dikarenakan PAD yang rendah dan dana transfer yang tinggi lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai.

Berikut grafik perbandingan belanja modal dan belanja pegawai selama sepuluh tahun terakhir :  
**Grafik 2 Rata-Rata Belanja Pegawai dan Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2014**



Sumber : DJPK, 2016 (Diolah)



Pengaruh secara langsung belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi diterima dalam penelitian ini. Berarti bahwa jika belanja modal pemerintah tinggi maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sularso dan Restianto (2011) yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi juga ditentukan oleh belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendarmin (2012) bahwa belanja modal yang selama ini dilakukan pemerintah berupa infrastruktur/sarana dan pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan juga penelitian oleh Badrudin (2011) bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh secara tidak langsung kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal diterima dalam penelitian ini. Dalam teori ekonomi, sebenarnya setiap pengeluaran pemerintah mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dapat berbentuk investasi ataupun konsumsi. Jika pengeluaran pemerintah dalam bentuk konsumsi maka pengeluaran APBD yang dilakukan oleh pemerintah akan condong dalam bentuk belanja pegawai, sedangkan jika pengeluaran pemerintah dalam bentuk investasi maka pengeluaran APBD yang dilakukan adalah belanja modal. Jika pertumbuhan ekonomi yang diciptakan melalui investasi hanya dapat dilakukan oleh daerah yang memiliki pendapatan yang cukup besar, dikarenakan untuk melakukan investasi maka pemerintah perlu melakukan penundaan konsumsi untuk meningkatkan kemampuan pendapatan dimasa yang akan datang. Dengan kata lain menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui investasi adalah dalam jangka waktu panjang. Hal ini nantinya akan berimbas pada peningkatan pendapatan daerah dikemudian hari. Dengan adanya peningkatan pendapatan daerah maka daerah akan lebih maju dan mandiri sehingga tujuan adanya desentralisasi akan tercapai dan masyarakat lebih sejahtera.

Hasil pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sularso dan Restianto (2011) bahwa kinerja keuangan secara tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Selain itu hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Lucky (2013) yang membuktikan bahwa kinerja keuangan berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Temuan ini mengindikasikan bahwa salah satu faktor secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi di daerah adalah kinerja keuangan daerahnya terutama rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD, dan derajat desentralisasi fiskal. Dengan demikian adanya desentralisasi fiskal dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah secara tidak langsung dengan mengalokasikan dana pada belanja modal yang lebih tinggi.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil serta pembahasan pada bab sebelumnya dan rumusan masalah yang telah peneliti tetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kinerja keuangan daerah berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan derajat desentralisasi fiskal secara langsung berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal pemerintah. Sedangkan rasio ketergantungan secara langsung tidak memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal pemerintah, dikarenakan dana transfer yang tinggi mayoritas digunakan untuk belanja pegawai. Kinerja keuangan yang baik akan meningkatkan belanja modal yang nantinya akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah.
2. Belanja modal secara langsung memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jawa timur. Artinya, bahwa ketika pemerintah meningkatkan belanja modalnya sama dengan telah melakukan pembangunan dan investasi jangka panjang yang nantinya akan meningkatkan aktivitas ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Kinerja keuangan berupa rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan derajat desentralisasi fiskal secara tidak langsung berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal. Dari 4 ukuran kinerja keuangan terdapat satu ukuran yaitu rasio ketergantungan yang secara tidak langsung tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa timur.

### **Saran**

Berdasarkan pada hasil pembahasan dan kesimpulan, peneliti mempunyai saran sebagai berikut :

1. Tiga variabel kinerja keuangan pemerintah daerah yang memiliki pengaruh signifikan secara langsung maupun tidak langsung terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya ketiga variabel tersebut memiliki kondisi yang belum baik sehingga perlu ditingkatkan agar lebih memiliki pengaruh yang lebih besar nantinya. Hal ini dikarenakan kondisi pendapatan asli daerah kabupaten/kota di Jawa Timur relatif rendah sehingga mayoritas daerah memiliki kinerja keuangan terutama rasio kemandirian, derajat desentralisasi fiskal, dan rasio ketergantungan yang kurang, sehingga perlu untuk meningkatkan pendapatan daerah agar mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah. Pemerintah kabupaten/kota

- Provinsi Jawa Timur harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan mengupayakan kebijakan otonomi daerah terutama disektor PAD dengan cara melakukan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur yang nantinya dapat meningkatkan aktifitas ekonomi maupun menarik para investor. Sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh pada kenaikan PAD dan peningkatan kinerja keuangan daerah serta pertumbuhan ekonomi.
2. Pemerintah Daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur seharusnya mampu memperbaiki pengelolaan Keuangan daerah agar lebih efisien dan dapat menekan pengeluaran di sisi belanja pegawai dengan melakukan digitalisasi yang nantinya akan mengurangi pengeluaran untuk pembayaran gaji (belanja pegawai) sehingga dapat mengalihkannya untuk belanja yang produktif yaitu belanja modal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. 2014. *Deskripsi dan Analisis APBD 2014*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
- Adisubrata, Winarna Surya. 1999. *Otonomi Daerah di Era Reformasi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BP2FE.
- Badrudin, Rudy. 2011. Effect of Fiscal Decentralization on Capital Expenditure, Growth, and Welfare. *Economic Journal of Emerging Market*, Vol.3, (No.3) : 211-223.
- BPS. 2015. *Data Pertumbuhan Ekonomi*. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). Diakses pada tanggal 16 November 2015.
- DJPk. 2015. *Data Target dan Realisasi APBD*. [www.djpk.go.id](http://www.djpk.go.id). Diakses pada tanggal 20 Oktober 2015.
- Ferdinand, A. 2002. *Structural Equation Modelling Dalam Penelitian Manajemen. Aplikasi Model-Model Rumit Untuk Tesis S-2 dan Disertasi S-3*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2002. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPM.
- Hendarmin. 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal EKSOS*, Vol.8 (No.3) : 144-155.
- Juanim. 2004. *Analisis Jalur dalam Riset Pemasaran, Teknik Pengolahan Data SPSS & Lisrel*. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
- Khusaini, Mohammad. 2006. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE UNIBRAW.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit Airlangga.
- Lucky, Dihan. 2013. Analysis of The Effect of regional Financial Performance to Economic Growth, and Proverty Trough Capital Expenditure. *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol.4, (No.19) : 7-17.
- Mochamad, Fajar Hidayat. 2013. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB*, Vol.1, (No.2) : Semester Genap 2012/2013.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2011 tentang Klasifikasi Anggaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sudantoko, Djoko. 2003. *Dilema Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Sugiono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.

Sularso, H., Restianto, Y.E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, Vol.1, (No.2) : 109-124.

Sukirno, Sadono. 2002. *Teori Mikro Ekonomi*. Cetakan Keempat Belas. Jakarta: Rajawali Press.

Todaro, Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia ke-3*. Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.